

### **BAB III**

## **DINAMIKA AKTIVITAS PENDIDIKAN SEKOLAH THHK**

### **MOJOKERTO PASCA KEMERDEKAAN**

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, kegiatan pendidikan yang sempat tersendat-sendat perlahan dihidupkan kembali. Banyak sekolah-sekolah Tionghoa yang membuka kembali kegiatan pendidikan. Pada tahun 1950-an jumlah sekolah Tionghoa di Indonesia semakin meningkat, dan bersamaan dengan itu pemerintah Indonesia akhirnya mengeluarkan beberapa kebijakan bagi sekolah-sekolah Tionghoa karena ada indikasi penyebaran ideologi asing melalui sekolah-sekolah Tionghoa. Selain itu beberapa kebijakan di bidang ekonomi dan penyelesaian masalah dwi kewarganegaraan juga secara tak langsung memiliki dampak yang cukup besar terhadap kelangsungan hidup sekolah-sekolah Tionghoa di Indonesia. Hingga akhirnya terjadi penutupan paksa semua sekolah Tionghoa setelah peristiwa G30S pada tahun 1966.

#### **3.1 Pembukaan Kembali Sekolah THHK Mojokerto Pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia**

Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu dan para pemimpin bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, maka dimulailah babak baru dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Semangat nasionalisme Indonesia begitu kuat di setiap orang Indonesia di mana pun mereka berada.

Dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia mengalir dari berbagai pihak, tak terkecuali dari kalangan etnis Tionghoa.

Keadaan tersebut umum terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk juga di Mojokerto. Kalangan etnis Tionghoa juga menyambut kemerdekaan Indonesia dan kepergian Jepang dari Mojokerto dengan suka cita. Setelah kepergian tentara Jepang mereka bisa memulai lagi kegiatan yang sempat tersendat-sendat pada masa pendudukan Jepang, termasuk kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh Sekolah THHK. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Sekolah THHK berniat menghidupkan kembali kegiatan pendidikan. Seperti yang sudah disinggung di bab sebelumnya, bahwa pada masa pendudukan Jepang, semua sekolah harus mengikuti model pendidikan bergaya Jepang dan dipaksa untuk mengikuti kemauan Jepang untuk berhaluan ke Jepang.<sup>95</sup> Maka pada bulan Maret 1946, dengan usaha beberapa bekas guru dan pengurus, Sekolah THHK dibuka kembali. Pembukaan ini masih bersifat darurat karena kegiatan sekolah yang sesungguhnya masih belum bisa dilaksanakan. Masih banyak yang perlu diatur ulang akibat kebijakan Jepang di masa pendudukan tahun 1942. Pada waktu pembukaan kembali, jumlah murid Sekolah THHK tercatat kurang lebih 400 orang.<sup>96</sup>

Namun pada masa awal pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, situasi politik masih belum stabil dan masih mendapat banyak gangguan. Gangguan

---

<sup>95</sup> <http://www.pasarkreasi.com/talk/detail/edutainment/44/>, diakses pada tanggal 20 Desember 2012. Dalam hal ini pemerintah pendudukan Jepang menerapkan berbagai macam peraturan untuk sekolah-sekolah Tionghoa yaitu senam Taiso pada waktu pagi hari, menghormati ke Dewa Matahari, serta menyanyikan lagu nasional Jepang, Kimigayo.

<sup>96</sup> Anonim, *Buku Peringatan 100 Tahun Sekolah THHK* (Mojokerto: Perkumpulan Alumni Sekolah THHK, 2007), hlm. 33.

terbesar berasal dari pihak Belanda. Di tahun yang sama, Belanda yang masih ingin menguasai Indonesia juga mulai membangun kekuasaannya kembali. Terlebih lagi pada masa revolusi Mojokerto sebagai basis pertahanan dan ibukota sementara Jawa Timur ketika di Surabaya diserang tentara Sekutu.<sup>97</sup> Karena situasi politik yang tidak menentu maka kegiatan sekolah diliburkan selama beberapa bulan sementara para guru dan pengurus mengupayakan agar Sekolah THHK Mojokerto bisa dibuka kembali.

### **3.2 Perkembangan Sekolah THHK Mojokerto Hingga Penutupan Tahun 1966**

Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, di daerah-daerah masih terjadi pergolakan untuk mempertahankan kemerdekaan. Akibatnya banyak kegiatan masyarakat terganggu. Di Mojokerto sendiri keadaan masih belum menentu karena banyak terjadi kerusuhan, antara lain adanya pemberontakan untuk menurunkan bupati Mojokerto pada waktu itu karena sikapnya yang pro-Belanda.<sup>98</sup> Selain itu kondisi keamanan di Mojokerto tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan seperti biasa. Begitu juga dengan kegiatan etnis Tionghoa di Mojokerto. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia banyak kegiatan ekonomi dan pendidikan lumpuh. Gedung Sekolah THHK yang cukup besar dijadikan tempat komando sementara pasukan Indonesia.

---

<sup>97</sup> Ayuhanafiq, *Garis Depan Pertempuran: Lasykar Hizbullah 1945-1950* (Yogyakarta: Azzagrafika, 2013), hlm. 71.

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Yazid, 19 Januari 2014 di Miji gang 3 no. 20, Kec. Magersari, Kota Mojokerto

Setelah masa pembukaan kembali pada tahun 1946, Sekolah THHK Mojokerto masih diminati oleh banyak penduduk Tionghoa. Hal itu dikarenakan pengurus Sekolah THHK menentuksn biaya sekolah yang murah, namun mampu memberikan pendidikan yang layak untuk kalangan Tionghoa. Selain itu masih dibutuhkannya pendidikan yang berorientasi ke Tiongkok karena mereka masih merasa menjadi warga negara Tiongkok dan masih menganggap Tiongkok sebagai tanah airnya sehingga masih ada angan-angan untuk bisa kembali pulang ke Tiongkok. Oleh sebab itu sekolah-sekolah Tionghoa masih tetap bertahan meskipun pada akhirnya kelak pemerintah Indonesia menutup paksa sekolah-sekolah tersebut. Pada waktu itu di Mojokerto hanya ada 2 sekolah untuk etnis Tionghoa, yaitu Sekolah THHK dan sekolah *Gie Hien*. Tapi karena Sekolah THHK lebih populer dan memiliki gedung yang lebih luas maka Sekolah THHK menjadi pilihan sebagian etnis Tionghoa untuk menempuh pendidikan.

Pasca pembukaan darurat tahun 1946, jumlah murid yang masuk Sekolah THHK tercatat stabil seperti pada saat masa pendudukan Jepang. Kegiatan Sekolah THHK mengalami gangguan ketika peristiwa Agresi Militer I. Sekolah THHK sekali lagi dijadikan sebagai basis pertahanan para pejuang setelah Surabaya jatuh ke tangan Belanda. Hal menarik adalah pada saat-saat genting tersebut pada tahun 1947 pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan tentang sekolah Tionghoa di mana pemerintah akan memberikan subsidi bagi sekolah-

sekolah berbahasa pengantar bahasa *Kuo Yu* asalkan mereka mengajarkan bahasa Indonesia 6 jam per minggu mulai kelas 3 tingkat sekolah dasar.<sup>99</sup>

**Tabel 3**  
Perkembangan Jumlah Siswa Sekolah THHK Mojokerto

Tahun	Jumlah Siswa
1907	50
1920	100
1937	300
1943	400
1946	400
1948	900

*Sumber: Buku Peringatan 100 Tahun Sekolah THHK Mojokerto*

Tercatat pada bulan Juni 1948 siswa yang bersekolah di Sekolah THHK berjumlah sekitar 900 orang dengan jumlah guru yang mengajar sebanyak 17 orang.<sup>100</sup> Peningkatan jumlah murid tersebut belum diimbangi oleh tersedianya ruang kelas yang tidak mampu menampung jumlah murid sebanyak itu. Lagi-lagi Sekolah THHK dihadapkan pada permasalahan yang sama. Perluasan pertama Sekolah THHK di awal tahun 1940-an masih kurang untuk menampung jumlah murid yang meningkat dengan pesat. Berdasarkan kondisi tersebut, sekali lagi pengurus THHK berencana ingin memperluas bangunan sekolah untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran di Sekolah THHK dengan cara membangun sebuah gedung sekolah baru.

Kegiatan sekolah di Sekolah THHK dibagi menjadi kelas pagi dan kelas sore karena gedung yang baru masih belum ada maka. Sementara masalah ini

<sup>99</sup> Leo Suryadinata, "Indoesia Chinese Education Past and Present", *Indonesia* no. 14, Oktober 1972, hlm. 64.

<sup>100</sup> Anonim, *Buku Peringatan 100 Tahun...*, *op. cit.*, hlm. 109.

masih belum terpecahkan, masalah lain sudah datang menghampiri. Masalah tanah dan biaya kembali menjadi masalah yang harus dihadapi dalam pembangunan gedung baru.<sup>101</sup> Pada bulan April 1949 para pengurus THHK Mojokerto mulai membentuk panitia pembangunan gedung baru. Tugas panitia ini lebih kepada pencarian dana dan lahan yang sesuai dengan rencana para pengurus THHK. Njoo Tik Tjong dipilih sebagai ketua panitia tersebut, sementara anggota panitia yang lain adalah Tan Khen An sebagai wakil ketua dan Kwee Yit Min sebagai sekretaris. Sementara untuk masalah penggalangan dana dipercayakan kepada Ong Boen Tjo, Njoo Kang San, Njoo Tik Thjing, dan Tan Soen Hwie.<sup>102</sup>

Pada saat itu, ada sebidang tanah milik Ong Hwat Sioe yang akan dijual. Tanah tersebut terletak di selatan dan berseberangan dengan gedung Sekolah THHK. Lokasi tanah tersebut berada di Jalan Kapten Soemardjo, berseberangan dengan Klenteng Hok Sian Kiong.<sup>103</sup> Pengurus THHK mengirimkan Njoo Kang San dan beberapa pengurus lainnya untuk membicarakan masalah pembelian lahan dengan Ong Hwat Sioe.<sup>104</sup> Setelah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, maka tanah tersebut ditutup dan dibeli oleh pengurus THHK Mojokerto dengan harga Rp 5.000,-. Pada bulan September 1949, dimulailah pembangunan gedung baru Sekolah THHK. Para pengurus yang diberi tugas untuk mengumpulkan data berkeliling mulai dari Mojokerto sendiri hingga ke luar kota

---

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Liam Oen Wang, pada tanggal 21 September 2012 di Desa Perning, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto.

<sup>104</sup> Anonim, *loc. cit.*, hlm. 115.

hingga Bandung dan Jakarta. Namun masalah baru muncul lagi di saat pembangunan berjalan. Tanah milik Ong Hwat Sioe tersebut sudah dihuni oleh beberapa keluarga miskin yang menolak untuk diberi ganti rugi dan menuntut relokasi<sup>105</sup>. Tentunya hal tersebut sangat memusingkan para pengurus THHK Mojokerto yang sudah memiliki rencana yang matang dalam pembangunan gedung baru Sekolah THHK.

Atas inisiatif Njoo Tik Tjiong, maka keluarga yang menempati rumah-rumah kumuh di tanah Ong Hwat Sioe tersebut dapat direlokasi. Tempat relokasi yang baru tersebut menempati tanah milik The King Hwie. Letaknya bersebelahan dengan lokasi gedung Sekolah THHK yang akan dibangun. THHK Mojokerto mengeluarkan biaya sebesar Rp 5.000,- untuk relokasi penghuni rumah-rumah kumuh tersebut ke tempat relokasi yang baru. Njoo Tik Tjiong mengadakan perjanjian dengan The King Hwie, bila hasil sewa dari para penghuni rumah kumuh tersebut sudah memenuhi jumlah Rp 5.000,- maka selanjutnya uang sewa menjadi hak dari The King Hwie. Namun dalam perkembangannya penarikan uang sewa tersebut mengalami kesulitan, sementara tak lama kemudian Njoo Tik Tjiong meninggal dunia, maka keputusan hak sewa rumah sepenuhnya diserahkan kepada The King Hwie.<sup>106</sup>

Sementara itu pada akhir tahun 1949 pemerintah Belanda melalui hasil perundingan Konferensi Meja Bundar mengakui kedaulatan Indonesia dan

---

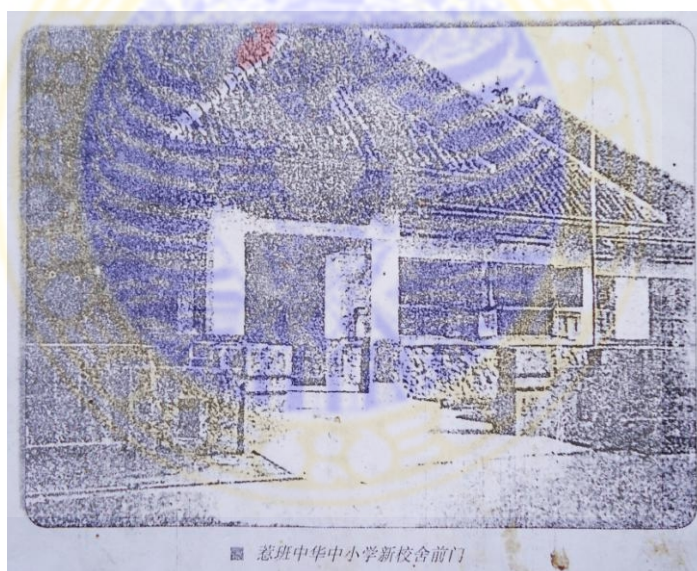
<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> *Ibid.*

menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara berbentuk serikat.<sup>107</sup> Setelah penyerahan kedaulatan Indonesia atas Belanda, pemerintah menutup semua sekolah-sekolah berbahasa pengantar bahasa Belanda yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, HCS juga ikut ditutup selain sebab tersebut, murid-muridnya juga banyak yang pindah ke sekolah-sekolah Tionghoa. Pendidikan model Belanda dirasa sudah tidak ada nilai pentingnya semenjak Indonesia merdeka. Inilah salah satu faktor mengapa jumlah siswa Sekolah THHK meningkat dengan pesat.

### Gambar 5

Gedung baru Sekolah THHK Mojokerto Tahun 1950



*Sumber: Buku Peringatan 100 Tahun Sekolah THHK. Mojokerto*

Tidak lama berselang pembangunan gedung baru Sekolah THHK selesai pada bulan Juni 1950, setelah memakan waktu selama kurang lebih 8 bulan dan

<sup>107</sup> P. N. H. Simanjutak, *Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan sampai Revolusi* (Jakarta: Djembatan, 2003), hlm. 89.



menelan biaya sebesar Rp 143.800,-.<sup>108</sup> Gedung sekolah tersebut memiliki 8 ruang kelas, 2 ruang persediaan, 1 kantor, dan 7 kamar dengan tempat tidur susun. Namun sangat disayangkan setelah pembangunan gedung baru ini selesai, Njoo Tik Tjiong telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 1950. Njoo Tik Tjiong tidak bisa melihat hasil dari kerja kerasnya dengan para pengurus yang lain selama pembangunan gedung baru Sekolah THHK. Pada waktu itu Sekolah THHK baru saja membuka sekolah menengah pertama bagi para lulusan SR THHK Mojokerto yang banyak dan tidak tertampung dari sekolah-sekolah lain.<sup>109</sup>

Bersamaan dengan itu pula, pada tahun 1950 pemerintah akhirnya menghentikan subsidi terhadap sekolah berbahasa pengantar bahasa *Kuo Yu* dan segera mengganti kebijakan berupa pengawasan terhadap sekolah-sekolah berbahasa pengantar *Kuo Yu* yang semakin banyak bermunculan.<sup>110</sup>

### **3.3 Reaksi Pengurus Sekolah THHK Mojokerto Terhadap Berbagai Kebijakan Diskriminatif Pemerintah Indonesia**

Pada saat pembukaan darurat Sekolah THHK pada tahun 1946, pemerintah belum memiliki undang-undang ataupun peraturan lain yang bertujuan untuk mengatur pendidikan yang ada di Indonesia, baik tentang sekolah-sekolah nasional maupun sekolah-sekolah asing. Di Mojokerto masih ada sekolah

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> Anonim, *Buku Peringatan 100 Tahun...*, *op. cit.*, hlm. 109.

<sup>110</sup> Leo Suryadinata, "Indonesia Chinese...", *op. cit.*, hlm. 65.

berbahasa pengantar bahasa Belanda yang masih berdiri. Sekolah itu bertahan hingga penyerahan kedaulatan Indonesia dari Belanda.<sup>111</sup>

Memasuki tahun 1950-an, sekolah-sekolah Tionghoa semakin berkembang dengan pesat. Kemunculan sekolah-sekolah baru serta ditutupnya sekolah-sekolah asing milik Belanda membuat sekolah-sekolah Tionghoa semakin ramai. Hal ini diperkuat juga dengan keputusan pemerintah pada waktu itu. Pada tanggal 13 Juni 1950, Menteri PPK Indonesia dan Menteri PPK RIS mengadakan pertemuan di Jakarta untuk membicarakan sistem pendidikan bagi sekolah-sekolah negeri dan juga sekolah-sekolah swasta asing. Hasilnya untuk warga negara asing memang tidak disediakan sekolah negeri tapi diizinkan membuka sekolah-sekolah baru sesuai dengan kebutuhannya dengan syarat memasukkan pelajaran bahasa Indonesia mulai tingkat kelas 3 SD.<sup>112</sup> Bahkan hampir di setiap kecamatan ada sekolah Tionghoa yang berdiri. Namun sekolah-sekolah Tionghoa yang ada di tingkat kecamatan hanya sebatas setingkat sekolah rakyat.

Permulaan tahun 1950-an merupakan tahun-tahun berkembangnya Sekolah THHK. Hal tersebut bisa dilihat dari suksesnya pembangunan gedung sekolah yang baru, meskipun hanya bermodalkan dana dari para donatur dan pengurus THHK Mojokerto. Di samping itu pada tahun 1950 Sekolah THHK juga mulai membuka jenjang *chuchung*.<sup>113</sup> Hal ini disebabkan karena banyak lulusan

<sup>111</sup> Sekolah tersebut adalah *Algemeene Lagere School* (AMS) yang ditutup pada tahun 1950. Gedungnya kemudian dipakai oleh HCTNH untuk dijadikan SR.

<sup>112</sup> Helmi Arief, *Menuju Nasionalisasi Sekolah Kuo Mintang: Kebijakan Pemerintah Terhadap Sekolah Cina di Jakarta 1950 – 1958* (Skripsi tidak diterbitkan pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Jakarta, 1994), hlm. 40.

<sup>113</sup> Di sekolah-sekolah Tionghoa umumnya lebih sering menggunakan istilah *chuchung* untuk tingkat SMP dan *kaochung* untuk tingkat SMA.

sekolah rakyat THHK Mojokerto kesulitan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sebagian besar dari mereka kesulitan untuk melanjutkan pendidikan di luar kota.

Pada waktu itu di Mojokerto, sekolah swasta yang bisa dikatakan layak, bermutu, dan terjangkau hanya Sekolah THHK dan sekolah milik Perguruan Tamansiswa Mojokerto. Banyak dari kalangan tidak mampu, baik etnis Tionghoa maupun orang-orang pribumi memasukkan anaknya ke sekolah milik Perguruan Taman Siswa karena biaya pendidikan yang sangat murah serta mampu memberikan pendidikan yang bagus, tidak kalah dengan sekolah-sekolah negeri. Selain itu HCTNH juga mulai membuka sekolah bagi etnis Tionghoa dan merupakan sekolah yang berstatus nasional sehingga warga Tionghoa yang sudah berstatus WNI bisa mendapatkan pelajaran yang sama dengan sekolah-sekolah negeri pada umumnya. Juga terdapat Sekolah *Gie Hien* yang berstatus swasta asing. Baik Taman Siswa, Sekolah THHK, HCTNH, ataupun Sekolah *Gie Hien* tidak melakukan provokasi-provokasi untuk menarik minat para etnis Tionghoa Mojokerto untuk masuk di sekolah yang mereka inginkan.<sup>114</sup>

Dalam pelajaran-pelajaran yang diberikan, Sekolah THHK memberikan pelajaran-pelajaran yang berorientasi ke Tiongkok. Ajaran budi pekerti juga masih tetap diajarkan, namun bukan dalam bentuk ajaran Konfusianisme tradisional seperti membaca dan menghafal kitab-kitab klasik, melainkan dengan bentuk yang baru yaitu dengan cara penyampaian seperti pelajaran pada umumnya dan menghilangkan pengajaran Konfusianisme yang bersifat ritus. Tradisi yang sudah

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan Tjan Kim Liong tanggal 29 Desember 2012 di Jalan Taman Pecatung Blok E9/25, Perumahan Purimas Rungkut, Surabaya.

berlangsung sejak zaman Tiongkok klasik tersebut memang sudah mendarah daging sehingga sekalipun Tiongkok sudah berganti rezim komunis namun ajaran Konfusianisme tetap dijaga dan diajarkan dengan cara pengajaran yang tidak menganut cara pengajaran para leluhur mereka terdahulu dengan membaca dan menghafal berbagai macam kitab klasik Kongucu.<sup>115</sup>

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka, yang mendapat peringkat bagus di kelas akan diberikan sebuah piagam kecil yang menyatakan bahwa mereka adalah juara kelas dan memenuhi 3 *hao*. Konsep 3 *hao* inilah yang dijadikan sebagai acuan dalam menilai siapa yang pantas menjadi juara kelas. Isi dari konsep 3 *hao* bila diterjemahkan secara terminologi adalah pelajaran bagus, jasmani bagus, dan pekerjaan sosial bagus.<sup>116</sup> Pekerjaan sosial yang bagus cerminan dari penerapan konsep 5 *ai* yang diterapkan oleh Sekolah THHK. Selain itu mereka juga mendapatkan hadiah berupa buku tulis, peralatan tulis, dan peralatan sekolah lainnya.<sup>117</sup>

Pada tahun 1952 pemerintah Indonesia mewajibkan semua sekolah asing menambahkan beberapa pelajaran tentang Indonesia. Menyikapi hal tersebut, semua sekolah asing termasuk Sekolah THHK mulai menambahkan mata pelajaran Sejarah Indonesia, Bahasa Indonesia, dan Ilmu Bumi Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang semakin meningkatkan

---

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan Gatot Seger, tanggal 13 November 2012 di Jalan Jagalan III/47, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo.

<sup>116</sup> Wawancara dengan Tjan Kim Liong tanggal 29 Desember 2012 di Jalan Taman Pecatung Blok E9/25, Perumahan Purimas Rungkut, Surabaya.

<sup>117</sup> Wawancara dengan Han Giok Sin pada tanggal 15 Juni 2013 di Desa Parning, RT 22 RW 02, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto

pengawasan terhadap pengajaran sekolah-sekolah asing, khususnya sekolah-sekolah Tionghoa.<sup>118</sup>

Untuk mata pelajaran sejarah Indonesia dan bahasa Indonesia, Sekolah THHK merekrut 2 guru pribumi untuk mengajar dua mata pelajaran tersebut. Mereka adalah Siti Soendari yang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Soedirdjo Atmodjo yang mengajar mata pelajaran Sejarah Indonesia.<sup>119</sup> Meskipun Sekolah THHK sudah mengikuti peraturan pemerintah tentang penambahan pelajaran-pelajaran Indonesia, namun masih mempertahankan mata pelajaran yang berbau asing dan masih memakai bahasa *Kuo Yu* sebagai bahasa pengantar. Pelajaran-pelajaran asing seperti Sejarah Tiongkok, Bahasa Tiongkok, dan Ilmu Bumi Tiongkok masih dipertahankan sebagai pelajaran utama

### Gambar 6

Soedirdjo Atmodjo, guru yang mengajar Sejarah Indonesia di Sekolah THHK Mojokerto Tahun 1952



*Sumber: Buku Peringatan 100 Tahun Sekolah THHK Mojokerto*

<sup>118</sup> Audi Marcellina, *Lembaga Pendidikan Swasta Tionghoa di Surabaya: Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Indonesia (YPPI) Tahun 1947-1967* (skripsi tidak diterbitkan pada Universitas Airlangga, 2011), hlm. 33.

<sup>119</sup> Anonim, *Buku Peringatan 100 Tahun...*, *op. cit.*, hlm. 54. Informasi ini juga didapat dari hasil wawancara dengan Gatot Seger, tanggal 13 November 2012 di Jalan Jagalan III/47, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo.

Mata pelajaran Sejarah Indonesia dan Bahasa Indonesia diajarkan dengan bahasa Indonesia, sementara mata pelajaran Ilmu Bumi Indonesia kadang diajarkan dalam bahasa *Kuo Yu* dan dalam bahasa Indonesia. Pelajaran yang lainnya tetap diajarkan dengan bahasa pengantar bahasa *Kuo Yu*.<sup>120</sup>

### Gambar 7

Siti Soendari, guru yang Mengajar Bahasa Indonesia di Sekolah THHK.Mojokerto Tahun 1952



*Sumber: Buku Peringatan 100 Tahun Sekolah THHK Mojokerto*

Siti Soendari dan Soendari Atmodjo mulai mengajar di Sekolah THHK pada tahun 1952. Mereka mengajar di tingkat SMP, karena pada waktu itu Sekolah THHK belum memiliki jenjang pendidikan SMA.

---

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan Gatot Seger, tanggal 13 November 2012 di Jalan Jagalan III/47, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo.

Berikut ini merupakan daftar nama pengurus Sekolah THHK yang ada di tahun 1952:

- Penasehat : Wang Wenzuo, Chen Shunhui, Zeng Jinlong, Yang Xiecai
- Wakil Ketua Pengurus dan Ketua Komite Sekolah : Guo Yimin
- Ketua : Zhou Songbai
- Wakil Ketua Komite Sekolah : Wen Beixiang
- Sekretaris Bahasa Asing : Chen Baoduan
- Ketua Bagian Kemahasiswaan : Chen Zhuoan
- Sekretaris Bahasa *Kuo Yu* : Zhu Senfang
- Bagian Keuangan : Chen Boxiong, Zheng Jingou
- Bagian Urusan Umum : Lin Anhui
- Anggota Komite Sekolah : Wu Xinde, Chung Lie The
- Pengawas : Li Qiyang, Chen Jinliang, Wang Yuanshun
- Humas : Lin Kangxi, Lu Wen Chan
- Ketua Bidang Kedisiplinan : Li Aiqun
- Kepala Sekolah : Liao Muliang
- Ketua Bagian Pendidikan : Lin Shaoying
- Ketua Bagian Olahraga : Chen Tingxun

- Ketua Bagian Humas : Wenhua Ching
- Bagian Marketing : Cha Wen Tian
- Guru-guru : Zhou Rongfeng, Xu Baiya, Soedirdjo Atmodjo, Siti Soendari, Li Zhuoxing, Lin Fuqun, Li Shengyuan, Chen Huaiheng, Lin Shaokuan, Xu Wenchu, Fang Xiande, Gao Fu Lai, Wang, Xiuzhu, Gao Yongyong, Zhu Huamei, Deng Yuanfen, Ruan Yue An, Yang Jia Li, Liang Rongshou, Xu Liqiu, Lin Yulian, Li Runzhen, Wen Xinmei.

Pada tahun 1953, Sekolah THHK sudah memiliki jenjang sekolah menengah. Pendidikan olahraga merupakan hal wajib bagi Sekolah THHK. Dalam bidang olahraga, Sekolah THHK dikenal memiliki tim basket yang kuat. Hal itu disebabkan selain sudah memiliki lapangan basket sendiri dalam kompleks gedung sekolah, olahraga basket merupakan olahraga yang populer di kalangan sekolah-sekolah Tionghoa.<sup>121</sup> Sekolah THHK memiliki tim basket yang lengkap, baik tim basket putra maupun tim basket putri.<sup>122</sup> Selain itu kegiatan ekstrakurikuler yang berkembang di Sekolah THHK adalah kependuan dan kegiatan tari, baik tari tradisional Tiongkok maupun tari-tarian Indonesia.<sup>123</sup>

---

<sup>121</sup> Hasil wawancara dengan Tjan Kim Liong tanggal 29 Desember 2012 di Jalan Taman Pecatung Blok E9/25, Perumahan Purimas Rungkut, Surabaya.

<sup>122</sup> Anonim, *Buku Peringatan 100 Tahun...*, *op. cit.*, hlm. 94-97.

<sup>123</sup> Hasil wawancara dengan Tjan Kim Liong tanggal 29 Desember 2012 di Jalan Taman Pecatung Blok E9/25, Perumahan Purimas Rungkut, Surabaya. Lihat juga *ibid.*, hlm. 98-100.



Selain itu juga diadakan kegiatan rutin tahunan malam resepsi yaitu semacam pesta kecil untuk memperingati hari kemerdekaan Tiongkok.<sup>124</sup>

Pada tahun itu juga Sekolah THHK kedatangan Konsul Jenderal dari Tiongkok yang sedang berkunjung. Para guru, pengurus, dan murid-murid Sekolah THHK sangat antusias dan menyambut kedatangan Konsul Jenderal dari Tiongkok. Maksud kedatangannya adalah untuk mengunjungi kerabat leluhurnya.<sup>125</sup> Selain itu Konsul Jenderal dari Tiongkok juga berbincang-bincang dan bertanya tentang bagaimana perkembangan Sekolah THHK.

Sementara itu situasi yang berkembang berkaitan dengan pesatnya kemajuan yang dicapai oleh sekolah-sekolah Tionghoa asing di akhir tahun 1950-an mulai tidak kondusif bagi perkembangan sekolah-sekolah Tionghoa asing. Pada akhir tahun 1957, pemerintah mulai merancang peraturan tentang pemisahan murid-murid yang berkewarganegaraan Indonesia dari sekolah-sekolah asing, dalam hal ini sekolah-sekolah Tionghoa asing. Di samping itu pemerintah secara sepihak juga mengeluarkan peraturan tentang penutupan sekolah-sekolah Tionghoa yang berhubungan/berafiliasi dengan Taiwan atau Kuomintang. Hal tersebut dikarenakan adanya dugaan pemerintah mengenai keterlibatan Taiwan dalam peristiwa PRRI/Permesta.<sup>126</sup> Peraturan tersebut dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer No.989 PMT/1957 tanggal 13 November 1957 tentang Peraturan dan Pengawasan Pengajaran Asing dan Surat

<sup>124</sup> Anonim, *Buku Peringatan 100 Tahun...*, *loc. cit.*, hlm. 89.

<sup>125</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

<sup>126</sup> Charles A. Coppel, *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 80.

Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan No.113826/S tentang peraturan pengawasan pengajar asing.<sup>127</sup> Maka untuk menindak lanjuti keputusan-keputusan tersebut, Koordinator Inspeksi Pengajaran Daerah Jawa Timur memberi instruksi untuk kepala sekolah SR hingga SMA yaitu:

1. Meminta agar semua sekolah negeri, swasta, partikelir yang diakui oleh negara membantu siswa dari sekolah asing agar mendapat tempat disekolah-sekolah negeri, partikelir atau sejenisnya sesuai dengan tingkatnya.
2. Memberikan kesempatan pada siswa sekolah asing untuk mendaftarkan diri mengikuti ujian yang akan diadakan pada tahun 1958.<sup>128</sup>

Di Jawa Timur sendiri sudah ada pertemuan yang dilangsungkan pada tanggal 11 November 1957 mengenai pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut. Semua yang hadir dalam pertemuan tersebut merupakan orang-orang Tionghoa yang berkewarganegaraan Indonesia.<sup>129</sup> Permulaan tahun 1958, pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa terhitung mulai tanggal 1 Januari 1958 warga negara Indonesia dilarang bersekolah di sekolah-sekolah asing. Peraturan tersebut lebih ditujukan kepada sekolah Tionghoa asing, yang masih mempertahankan pelajaran-pelajaran ber kurikulum asing dan berbahasa pengantar bukan bahasa Indonesia. Dalam ini selanjutnya Kepala Inspeksi Pengajaran Asing Daerah VI

---

<sup>127</sup> “Djanuari ’58, Sekolah Asing Tak Boleh Menerima Murid WNI”, *Pewarta Soerabaia*, 18 Desember 1957, hlm. 2.

<sup>128</sup> *Ibid.*

<sup>129</sup> *Ibid.*

(Jawa Timur), telah mengeluarkan pengumuman No. 2634/IPA-VI/XII/'57 memberi instruksi untuk semua kepala sekolah asing di Jawa Timur yaitu:

1. Mulai 1 Januari 1958 untuk tidak lagi menerima siswa warga negara Indonesia atau siswa yang belum jelas kewarganegaraanya.
2. Menginstruksikan untuk mengeluarkan semua siswa warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai murid paling lambat 20 Januari 1958.<sup>130</sup>

Peraturan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah khawatir sekolah-sekolah tersebut nantinya akan merugikan bangsa dan negara, mengingat sekolah-sekolah swasta asing mengorientasikan diri ke negara lain yang tidak sejalan dengan falsafah hidup bangsa Indonesia. Selain itu pemerintah juga khawatir pendidikan yang seperti itu ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik yang nantinya memperburuk keadaan politik di Indonesia. Sekolah-sekolah tersebut juga harus meminta izin kepada Menteri Pendidikan, demikian juga gurugurunya harus memiliki izin dari Menteri Pendidikan.<sup>131</sup>

Buku-buku pelajaran pun juga diperiksa lebih ketat dan hasilnya pada tahun yang sama banyak buku pelajaran sekolah-sekolah Tionghoa dilarang untuk diajarkan. Sebagai gantinya Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan menerbitkan buku-buku pelajaran untuk sekolah-sekolah Tionghoa dengan versi mereka sendiri yang lebih bercorak nasionalisme Indonesia dan mengedarkannya ke sekolah-sekolah Tionghoa.<sup>132</sup> Sebenarnya sekolah-sekolah

---

<sup>130</sup> *Ibid.*

<sup>131</sup> Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa* (Jakarta: Grafiti, 1984), hlm. 157.

<sup>132</sup> Helmi Arief, *Menuju Nasionalisasi Sekolah*, *op. cit.*, (bagian Abstraksi). Hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Gatot Seger, tanggal 13 November 2012 di Jalan Jagalan

swasta asing sempat meminta bantuan berupa subsidi biaya pendidikan bagi sekolah-sekolah yang mengajarkan mata pelajaran yang bercorak kebudayaan nasional Indonesia sesuai dengan instruksi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.<sup>133</sup> Namun permintaan ini tidak dihiraukan pemerintah pusat dan tetap menjalankan kegiatannya dengan bantuan para donatur. Sekolah THHK tidak pernah meminta atau mendapatkan subsidi dari pemerintah dan sejak awal pembukaan kembali tahun 1946 pembiayaan kegiatan belajar mengajar di Sekolah THHK hanya bergantung kepada donatur dan uang iuran sekolah.

Berhubungan dengan peraturan pemerintah yang melarang murid-murid yang berkewarganegaraan Indonesia bersekolah di sekolah-sekolah asing, sebagian murid Sekolah THHK yang sudah berkewarganegaraan Indonesia akhirnya pindah sekolah ke sekolah milik HCTNH yang terletak di Jalan Galuhan, tidak jauh dari Sekolah THHK. Rata-rata mereka yang pindah ke sekolah milik HCTNH bisa mengikuti pelajaran dengan baik karena menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Mereka yang pindah juga langsung masuk jenjang pendidikan sebelumnya di Sekolah THHK.<sup>134</sup>

Tak lama berselang, pemerintah kembali mengeluarkan peraturan yang bersifat diskriminatif. Pada tanggal 29 Juli 1958, pemerintah Indonesia dengan persetujuan dari DPR telah mengesahkan Undang-Undang No. 62 tahun 1958

---

III/47, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan Tjan Kim Liong tanggal 29 Desember 2012 di Jalan Taman Pecatung Blok E9/25, Perumahan Purimas Rungkut, Surabaya.

<sup>133</sup> "Sekolah2 Tionghoa", *Pewarta Soerabaia*, 18 Juli 1957

<sup>134</sup> Wawancara dengan Han Giok Sin pada tanggal 15 Juni 2013 di Desa Parning, RT 22 RW 02, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto.

tentang Kewarganegaraan Indonesia.<sup>135</sup> Namun keadaan politik yang sedang bergolak tidak mempengaruhi situasi kegiatan pendidikan di Sekolah THHK. Hal ini dikarenakan guru-guru Sekolah THHK tidak terlalu tertarik dengan perkembangan politik yang sedang tidak menentu di Indonesia.<sup>136</sup>

Meskipun banyak peraturan-peraturan yang merugikan bagi kegiatan pendidikan etnis Tionghoa dan etnis Tionghoa khususnya, Sekolah THHK masih tetap bisa berkembang. Pada tahun 1959 Sekolah THHK membuka jenjang pendidikan *kaochung*. Hal ini menjadi berita baik bagi sebagian besar lulusan-lulusan sekolah swasta Tionghoa yang berstatus asing yang berada di sekitar Mojokerto, mengingat tahun-tahun tersebut pengawasan pengajaran asing semakin diperketat dan bagi murid-murid yang masih berstatus warga negara Indonesia atau masih diragukan statusnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA dipersulit. Jenjang sekolah *kaochung* tersebut sama seperti sekolah menengah pada umumnya di Mojokerto, terdapat dua jurusan yaitu ilmu alam dan ilmu sosial.<sup>137</sup>

Namun tak lama berselang setelah pembukaan SMA THHK Mojokerto, keadaan politik di Indonesia kembali menemui situasi yang tidak menentu setelah pemerintah kembali mengeluarkan peraturan yang diskriminatif tentang kebijakan ekonomi warga etnis Tionghoa. Presiden Soekarno di luar dugaan

<sup>135</sup> C. S. T. Kansil, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 109.

<sup>136</sup> Hasil wawancara dengan Gatot Seger, tanggal 19 Juli 2013 di Jalan Jagalan III no. 47, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo.

<sup>137</sup> Hasil wawancara dengan Gatot Seger, tanggal 13 November 2012 di Jalan Jagalan III/47, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo. *Kaochung* merupakan penyebutan jenjang pendidikan setingkat SMA yang biasa digunakan di sekolah-sekolah Tionghoa.

menandatangani Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1959 yang lebih dikenal dengan PP 10 tentang Larangan Bagi Usaha Perdagangan Kecil dan Eceran yang Bersifat Asing di Luar Ibu Kota Daerah Swatantra Tingkat I dan II serta Karesidenan.<sup>138</sup> Perjanjian tersebut ditandatangani pada bulan November 1959 dan peraturan tersebut mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 1960.<sup>139</sup> Keputusan tersebut secara tak langsung juga memiliki dampak terhadap kegiatan pendidikan di Sekolah THHK. Sebagian murid terpaksa ikut orang tuanya meninggalkan Indonesia untuk pergi ke Tiongkok. Kawasan Jalan Mojopahit yang notabene merupakan kawasan pecinan di Mojokerto serta pusat kegiatan perokonomian etnis Tionghoa dan tempat tinggal sebagian murid Sekolah THHK menjadi sepi, banyak toko yang terpaksa tutup, sebagian dari mereka ada yang ikut menuju Tiongkok ada pula yang berdiam di rumah. Selain itu mereka yang terkena PP 10 dengan sendirinya sadar bahwa mereka merasa asing karena status mereka merupakan warga negara Tiongkok dan memutuskan untuk pulang ke Tiongkok.<sup>140</sup> Namun pada kenyataannya keputusan PP 10 tidak membuat kegiatan ekonomi etnis Tionghoa menjadi lumpuh karena tak lama berselang ada beberapa toko yang sudah mulai membuka usahanya kembali.

Memang setelah berlakunya Undang-Undang No. 62 tahun 1958, banyak yang memilih warga negara Indonesia, namun guru-guru Sekolah THHK tidak melakukan hal tersebut. Mereka beralasan tidak melakukan pergantian status

---

<sup>138</sup> *Lembaran Negara* no. 128 tahun 1959.

<sup>139</sup> Benny G. Setiono, *op. cit.*, hlm. 671.

<sup>140</sup> Wawancara dengan Han Giok Sin pada tanggal 15 Juni 2013 di Desa Parning, RT 22 RW 02, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto.

kewarganegaraan karena bila mereka berganti warga negara Indonesia, mereka akan kehilangan pekerjaan mereka sebagai guru. Terlebih lagi situasi ekonomi yang tidak kunjung membaik membuat sebagian guru-guru tetap menjadi warga negara asing. Namun para guru tersebut tidak pernah mengajarkan paham nasionalisme Tiongkok karena mereka sadar bahwa mereka nantinya akan meninggal dan dimakamkan di Indonesia. Mereka tetap mengingatkan murid-murid Sekolah THHK bahwa negara mereka adalah Indonesia, bukan Tiongkok.<sup>141</sup>

Setelah menghadapi semua masalah, maka pasca tahun 1960 Sekolah THHK kembali melaksanakan kegiatan dengan lancar. Hingga pada tahun 1965 terjadi peristiwa G30S yang diduga didalangi oleh PKI kembali membuat situasi politik di Indonesia menjadi terganggu. Di kalangan guru-guru Sekolah THHK sudah mengamati dan mengikuti perkembangan situasi politik di Indonesia. Mereka sudah mewanti-wanti tentang perkembangan situasi politik Indonesia yang sedang tidak baik. Namun di kalangan murid, tidak ada perubahan dalam kegiatan belajar mengajar. Hanya saja keadaan Mojokerto pada saat itu agak mencekam.<sup>142</sup> Namun hal tersebut belum mempengaruhi proses belajar mengajar yang ada di Sekolah THHK maupun di sekolah Tionghoa yang sudah berstatus nasional.

---

<sup>141</sup> Hasil wawancara dengan Tjan Kim Liong tanggal 29 Desember 2012 di Jalan Taman Pecatung Blok E9/25, Perumahan Purimas Rungkut, Surabaya.

<sup>142</sup> Hasil wawancara dengan Gatot Seger, tanggal 19 Juli 2013 di Jalan Jagalan III/47, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo.

Kedanaan Mojokerto pada waktu itu mencekam, pembunuhan marak terjadi. Banyak sekali orang yang diduga sebagai simpatisan PKI dibunuh.<sup>143</sup> Tahun 1966 pemerintah Indonesia melalui Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan mengeluarkan Keputusan No. 16 tahun 1966 tentang Tindak Lanjut dari Penutupan Sekolah Asing.<sup>144</sup> Seluruh sekolah swasta asing yang ada di Indonesia akhirnya ditutup paksa dan gedung-gedungnya dijadikan sekolah-sekolah negeri. Termasuk Sekolah THHK dalam hal ini sebagai sekolah swasta asing juga dengan sangat terpaksa menghentikan seluruh kegiatan belajar mengajarnya. Setelah penutupan paksa berkenaan dengan peraturan Kementertian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, banyak murid Sekolah THHK yang putus sekolah dan bingung untuk melanjutkan pendidikannya. Setelah kegiatan belajar-mengajar berhenti total, gedung milik Sekolah THHK dijadikan oleh TNI AD sebagai gedung untuk basis komando dan tempat menampung para simpatisan PKI dari berbagai wilayah di sekitar Mojokerto sebelum dieksekusi.<sup>145</sup>

Sebagian ada yang masuk ke sekolah milik HCTNH yang sudah berganti nama menjadi Taruna Nusa Harapan dan merupakan sekolah swasta nasional, sebagian lagi memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya.<sup>146</sup> Di beberapa kota, sekolah-sekolah asing ini ada yang tetap berdiri namun dengan

---

<sup>143</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Yazid, 19 Januari 2014 di Miji gang 3 no. 20, Kec. Magersari, Kota Mojokerto.

<sup>144</sup> Lihat lampiran 12.

<sup>145</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Yazid, 19 Januari 2014 di Miji gang 3 no. 20, Kec. Magersari, Kota Mojokerto.

<sup>146</sup> Murid-murid Sekolah THHK yang melanjutkan ke sekolah milik Yayasan Taruna Nusa Harapan (sebelumnya HCTNH) diturunkan 1 tahun dari jenjang pendidikan yang sudah ditempuh sebelumnya di Sekolah THHK. Hal ini berlaku untuk tingkat SD, SMP, dan SMA.



memakai nama yang berbeda, misalnya sekolah milik THHK Malang berganti nama menjadi Taman Harapan Harapan Kita.<sup>147</sup> Dengan demikian lenyaplah sudah perjalanan tentang Sekolah THHK sebagai pelopor pendidikan modern di Mojokerto yang sudah ada sejak tahun 1907, tidak hanya pendidikan Tionghoa saja namun pendidikan secara umum.

### **3.4 Perkembangan Nasionalisme dalam Pendidikan Etnis Tionghoa di Mojokerto Dari Masa Kemerdekaan Hingga Penutupan Sekolah THHK**

Nasionalisme merupakan hal yang bermakna ambigu bagi etnis Tionghoa yang ada di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pada awalnya sebagian besar etnis Tionghoa yang ada di Indonesia masih cenderung menganggap bahwa Tiongkok merupakan negeri leluhur. Akan tetapi ada juga yang sudah memahami bahwa mereka hidup di Indonesia dan akan dikubur di Indonesia sehingga rasa cinta terhadap Tiongkok semakin berkurang.

Nasionalisme yang berkembang di kalangan etnis Tionghoa di Mojokerto juga menyebar melalui pendidikan. Penggunaan bahasa *Kuo Yu* sebagai bahasa pengantar dan juga pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan Tiongkok menjadikan orientasi mereka lebih cenderung ke arah Tiongkok walaupun ada beberapa yang sudah lebih cenderung ke Indonesia. Sekolah THHK berperan penting dalam menanamkan rasa nasionalisme di mana pada waktu adalah waktu yang kritis bagi etnis Tionghoa. Mereka diharuskan memilih untuk menjadi warga negara asing atau warga negara Indonesia. Mereka juga berada dalam situasi yang

---

<sup>147</sup> Hasil wawancara dengan Oei Him Hwie, tanggal 6 Februari 2013 di Perumahan Medayu, Surabaya.

tidak menentu, di mana dalam pendidikan mereka selalu ditanamkan tentang rasa cinta kepada Tiongkok namun mereka hidup dan mencari nafkah di Indonesia.

Sekolah THHK memiliki nama penyebutan bagi almamaternya, yaitu *Re Hua* (惹华). Istilah tersebut umumnya terdapat di sekolah-sekolah milik THHK, seperti THHK Jakarta yang menggunakan nama *Pa Hua* dan THHK Malang yang menggunakan nama *Ma Hua*. Kata *Re Hua* berasal dari kata *re ban* (惹班) yang merupakan istilah penyebutan Mojokerto dalam bahasa *Kuo Yu* dan *zhonghua xuexiao* (中华学校) sehingga bila disingkat menjadi *Re Hua*.<sup>148</sup>

Sekolah THHK, disamping juga Sekolah *Gie Hien*, sebagai pilar kebudayaan etnis Tionghoa yang ada di Mojokerto juga mengalami dinamika perkembangan nasionalisme dengan berbagai sebab dan akibatnya. Sekolah-sekolah Tionghoa, khususnya yang berstatus swasta asing, merupakan media penyebaran dan penanaman nasionalisme Tiongkok kepada etnis Tionghoa. Selain itu setelah kemerdekaan ada pula sekolah-sekolah yang sudah berorientasi ke Indonesia. Salah satunya adalah sekolah milik HCTNH Mojokerto yang tidak menggunakan bahasa *Kuo Yu* sebagai bahasa pengantar, melainkan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.

Pengaruh ideologi asing di pendidikan Tionghoa juga tercermin dari berbagai kegiatan yang ada di sekolah Tionghoa. Hal tersebut juga terlihat dari kegiatan pendidikan sehari-hari yang ada di Sekolah THHK dan sekolah milik

---

<sup>148</sup> Hasil wawancara dengan Gatot Seger, tanggal 19 Juli 2013 di Jalan Jagalan III/47, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo.

HCTNH. Dari penggunaan bahasa pengantar, di Sekolah THHK maupun Sekolah *Gie Hien* menggunakan bahasa *Kuo Yu* di semua kegiatan pendidikannya. Sementara di sekolah milik HCTNH sudah menggunakan bahasa Indonesia, namun bahasa *Kuo Yu* tidak diajarkan dalam jam pelajaran normal. Bahasa *Kuo Yu* hanya diajarkan sebagai pelajaran tambahan di luar jam pelajaran sekolah, biasanya pada sore hari.<sup>149</sup>

Di dalam kegiatan belajar mengajar Sekolah THHK, pelajaran yang cenderung ke arah Tiongkok baru diajarkan pada tingkat *chuchung* dan *kaochung*. Pelajaran-pelajaran tersebut antara lain Ilmu Bumi Tiongkok, Sejarah Tiongkok, dan pelajaran bahasa Tiongkok. Sedangkan pada tingkat sekolah rakyat, pelajaran yang diberikan masih sebatas dasar-dasar pelajaran, termasuk dasar belajar bahasa *Kuo Yu*. Namun karena adanya kebijakan pemerintah Indonesia yang khawatir terhadap perkembangan ideologi asing yang semakin menyebar dengan cepat melalui sekolah-sekolah asing, khususnya sekolah-sekolah Tionghoa, maka tahun 1952 pemerintah menganjurkan untuk menambah pelajaran-pelajaran Indonesia, yaitu Bahasa Indonesia, Ilmu Bumi Indonesia, dan Sejarah Indonesia. Di Sekolah THHK pelajaran Bahasa Indonesia mulai diajarkan pada kelas 3 tingkat sekolah rakyat. Sekalipun terdapat mata pelajaran Indonesia namun orientasi Sekolah THHK tetap ke Tiongkok.

Selain itu pengaruh ideologi asing di Sekolah THHK lebih terlihat jelas pada saat pelaksanaan upacara bendera. Upacara yang dilakukan setiap hari Senin pagi diikuti oleh semua murid dari tingkat SD hingga SMA, beserta para guru.

---

<sup>149</sup> Wawancara dengan Han Giok Sin pada tanggal 15 Juni 2013 di Desa Parning, RT 22 RW 02, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto.

Bendera yang dikibarkan adalah bendera Tiongkok, dengan diiringi nyanyian lagu nasional Tiongkok dan hormat bendera seperti yang dilakukan di Tiongkok. Hormat yang dimaksud adalah meletakkan tangan di sebelah pelipis kanan dengan telapak tangan menghadap ke depan. Kemudian adanya perayaan hari kemerdekaan Tiongkok yang dimeriahkan oleh tari-tarian tradisional Tiongkok, pagelaran wayang tonil, dan malam resepsi. Bahkan dalam acara malam budaya yang diselenggarakan Sekolah THHK, selalu ada bendera Tiongkok dan juga bendera Indonesia. Hal tersebut berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh sekolah milik HCTNH di mana upacara dilakukan setiap hari Senin pagi untuk penaikan bendera Indonesia dan hari Sabtu pagi untuk penurunan bendera Indonesia menjadi setengah tiang. Sedangkan untuk upacara peringatan kemerdekaan Indonesia merupakan kegiatan yang wajib diikuti, bila tidak mengikuti maka akan mendapatkan hukuman.<sup>150</sup>

Seperti lazimnya sekolah-sekolah Tionghoa asing yang cenderung ke arah Tiongkok di wilayah lain, para murid di Sekolah THHK juga diajarkan tentang rasa cinta tanah air leluhur, yaitu Tiongkok, dan juga mata pelajaran budi pekerti. Salah satu poin penting dalam mata pelajaran budi pekerti yang diajarkan oleh Sekolah THHK adalah konsep *5 ai*. Isi dari konsep *5 ai* ini merupakan intisari dari ajaran Konfusianisme yang dikemas dalam bentuk yang lebih modern mengikuti perkembangan zaman pada waktu itu. Isi dari konsep *5 ai* adalah:

1. *ai ren ming*, yaitu cinta kepada rakyat
2. *ai jia guo*, yaitu cinta negara/ibu pertiwi

---

<sup>150</sup> Hasil wawancara dengan Han Giok Sin pada tanggal 15 Juni 2013 di Desa Perring, RT 22 RW 02, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto.

3. *ai lao dong*, yaitu cinta kepada buruh
4. *ai ke xue*, yaitu cinta kepada ilmu pengetahuan
5. *ai hu kung kung chai wu*, yaitu cinta barang-barang/harta umum.<sup>151</sup>

Bentuk nyata dari konsep 5 *ai* di Sekolah THHK antara lain para muridnya perlahan diajarkan bahwa mereka selain tetap mencintai negeri Tiongkok sebagai tanah leluhur, mereka juga harus mulai mencintai Indonesia sebagai tanah tempat mereka hidup dan dikuburkan (*ai jia guo*); menghormati petani dan buruh (*ai lao dong*); dan menghormati guru-guru mereka (*ai ke xue*).<sup>152</sup> Hal itu menandakan bahwa ada dualisme di dalam rasa nasionalisme para murid Sekolah THHK, di mana selain mereka sudah ditanamkan ideologi Tiongkok melalui pelajaran-pelajaran di Sekolah THHK, mereka juga mulai diajarkan untuk mencintai Indonesia sebagai tempat hidup mereka yang baru.

Sebagai salah satu sekolah Tionghoa yang condong ke arah Tiongkok, Sekolah THHK Mojokerto juga didatangi pejabat dari Tiongkok. Sekolah THHK pernah dikunjungi oleh Konsul Jenderal Tiongkok untuk melihat perkembangan kegiatan pendidikannya. Kedatangan Konsul Jenderal Tiongkok tersebut terjadi pada tahun 1952. Selain berbincang-bincang dengan para pengurus dan guru Sekolah THHK, ia juga sempat berpidato di Sekolah THHK. Kedatangannya mendapat sambutan yang antusias dari murid-murid beserta guru dan pengurus Sekolah THHK.

---

<sup>151</sup> Hasil wawancara dengan Tjan Kim Liong tanggal 29 Desember 2012 di Jalan Taman Pecatung Blok E9/25, Perumahan Purimas Rungkut, Surabaya.

<sup>152</sup> *Ibid.*

Satu hal menarik yang patut diperhatikan adalah ambiguitas nasionalisme yang ada di Sekolah THHK. Selain pengibaran 2 bendera, Tiongkok dan Indonesia, terdapat pula foto dinding Mao Tse Tung dan Soekarno di beberapa ruangan di Sekolah THHK. Selain itu pada saat sebelum masuk dan pada waktu istirahat, selalu diputarkan lagu-lagu tradisional Tiongkok dan juga lagu nasional Indonesia, seperti Garuda Pancasila.<sup>153</sup>

Di samping terdapat nyanyian-nyanyian dari Tiongkok dan Indonesia, seperti lazimnya sekolah-sekolah Tionghoa pada umumnya, di Sekolah THHK juga memiliki lagu himne sendiri. Lagu tersebut menggunakan bahasa *Kuo Yu* dan syair-syairnya berisi tentang romantisme terhadap Tiongkok sebagai tanah negeri leluhur serta pujian-pujian terhadap Tiongkok.

Nasionalisme etnis Tionghoa yang bersekolah di Sekolah THHK juga terbentuk berdasarkan tempat tinggal dan pergaulan sehari-hari. Etnis Tionghoa yang bersekolah di Sekolah THHK tidak semuanya berasal dari kota Mojokerto, tetapi juga dari pedesaan yang ada di sekitar Mojokerto. Murid-murid yang berasal dari pedesaan umumnya lebih banyak bergaul dengan orang-orang pribumi sehingga fasih berbahasa Indonesia bahkan bahasa Jawa. Nasionalisme Indonesia pun muncul karena intensitas pergaulan dengan orang-orang pribumi.<sup>154</sup>

---

<sup>153</sup> Hasil wawancara dengan Gatot Seger, tanggal 19 Juli 2013 di Jalan Jagalan III/47, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo.

<sup>154</sup> *Ibid.*

### Gambar 8

Salah satu kegiatan Sekolah THHK, menari tari-tarian Indonesia pada tahun 1963



*Sumber: Buku Peringatan 100 Tahun Sekolah THHK Mojokerto*

Pembentukan nasionalisme di kalangan murid-murid Sekolah THHK juga dipengaruhi oleh para guru dan pengurus THHK yang menanamkan pemahaman sederhana tentang bentuk nasionalisme kepada murid-murid Sekolah THHK. Pada saat perayaan hari kemerdekaan Tiongkok, Sekolah THHK menyelenggarakan malam resepsi peringatan kemerdekaan Tiongkok yang biasanya diisi dengan berbagai macam pertunjukan semisal drama yang menggambarkan keadaan di Tiongkok lengkap dengan pakaian petani dan buruh yang biasa dipakai di Tiongkok. Para guru juga terkadang memberitahukan tentang pentingnya mencintai Indonesia sebagai tempat tinggal mereka karena mungkin mereka tidak akan pernah bisa ke Tiongkok dan akan hidup, bekerja, dan mati di Indonesia.<sup>155</sup>

<sup>155</sup> Hasil wawancara dengan Tjan Kim Liong tanggal 29 Desember 2012 di Jalan Taman Pecatung Blok E9/25, Perumahan Purimas Rungkut, Surabaya.

Sebagian besar lulusan Sekolah THHK terjun di bidang ekonomi, seperti perdagangan dan hanya sedikit yang sanggup melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya. Hal ini selain karena kurikulum yang dipakai di Sekolah THHK menggunakan kurikulum asing, pemerintah Indonesia sendiri sangat membatasi masalah pendidikan bagi para lulusan THHK yang ingin melanjutkan pendidikannya di Indonesia. Setelah Sekolah THHK ditutup pada tahun 1966 maka pengaruh nasionalisme Tiongkok di bidang pendidikan mulai memudar. Hal tersebut bisa dipahami karena Sekolah THHK merupakan sarana yang bisa dikatakan baik dalam menanamkan rasa kecintaan terhadap Tiongkok sebagai tanah leluhur mereka. Sebagian murid-murid Sekolah THHK ada yang masuk ke sekolah milik Yayasan TNH.<sup>156</sup> Untuk membantu menyesuaikan murid-murid Sekolah THHK maka sekolah milik Yayasan TNH memberikan pelajaran tambahan di sore hari untuk mengejar ketertinggalan pelajaran-pelajaran yang tidak diajarkan di Sekolah THHK. Sekolah Yayasan TNH juga menerapkan kebijakan untuk menurunkan jenjang pendidikan satu tingkat yang dicapai ketika masih di Sekolah THHK. Hal ini agar murid-murid Sekolah THHK bisa beradaptasi menerima pelajaran umum dengan baik.<sup>157</sup>

Sekolah THHK telah memberikan pengaruh yang besar bagi para muridnya yang pernah bersekolah di sana. Sebagai pelopor pendidikan Tionghoa di Mojokerto Sekolah THHK sangat berperan dalam membentuk kepribadian

---

<sup>156</sup> Yayasan TNH sebelumnya merupakan organisasi Tionghoayaitu HCTNH (*Hua Chiao Tsing Nien Hui*), kemudian berganti nama menjadi TNH (*Tsing Nien Hui*) dan akhirnya menjadi Taruna Nusa Harapan.

<sup>157</sup> Hasil wawancara dengan Han Giok Sin pada tanggal 15 Juni 2013 di Desa Pening, RT 22 RW 02, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto.



murid-muridnya, memberikan pendidikan yang berkualitas sehingga Sekolah THHK tetap memberikan kesan yang baik bagi para murid dan guru yang pernah ada di sana.

